



Implementai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional: Urgensi dan Strategi Penguatan Karakter Bangsa

¹Sri Yunita, ²Flanella Natama Harahap, ³Yona Revalina Ginting, ⁴Nuramanda Nuramnada
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author:

Sri Yunita

sriyunita@unimed.ac.id

Abstract

Civic Education (PKn) is a fundamental component of modern educational systems, designed as a curricular program to instill democratic values, Pancasila morals, and an awareness of citizens' rights and obligations. This abstract discusses the significance of PKn in shaping students' character and national identity, not merely as an informative subject but as a vehicle for developing civic disposition and civic competence. The focus of this study includes an analysis of the relevance of PKn material in the context of social and global changes, innovative pedagogical approaches that can enhance learning effectiveness, and PKn's role in encouraging active student participation in community life. This research asserts that PKn, as a structured and adaptive curricular program, is essential for fostering a young generation that is critical, responsible, and ready to contribute to the nation's progress within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: Civic education, curriculum, national character, implementation

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan modern, dirancang sebagai program kurikuler untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, moral Pancasila, dan kesadaran akan hak serta kewajiban warga negara. Abstrak ini membahas signifikansi PKn dalam membentuk karakter dan identitas nasional peserta didik, bukan hanya sebagai mata pelajaran informatif, melainkan sebagai wahana pembentukan civic disposition dan civic competence. Fokus kajian meliputi analisis terhadap relevansi materi PKn dalam konteks perubahan sosial dan global, pendekatan pedagogis inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta peran PKn dalam mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa PKn sebagai program kurikuler yang terstruktur dan adaptif sangat esensial untuk melahirkan generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi pada kemajuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan kewarganegaraan, kurikulum, Karakter bangsa, Implentasi

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan sentral dalam membentuk karakter bangsa yang kuat dan bertanggung jawab. Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan kontemporer, urgensi PKn semakin terasa, tidak hanya sebagai mata pelajaran formal, melainkan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang cakap, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional menjadi arena utama implementasi PKn, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada generasi muda. Namun, implementasi PKn dalam praktik pendidikan seringkali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan metodologi pengajaran, kurangnya relevansi

materi dengan isu-isu aktual, hingga tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai PKn secara holistik dalam seluruh aspek pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi implementasi PKn dalam kurikulum nasional dan merumuskan strategi penguatan karakter bangsa melalui pendidikan ini. Pembahasan akan meliputi analisis terhadap relevansi PKn dalam konteks tantangan kebangsaan saat ini, serta identifikasi berbagai pendekatan dan model implementasi yang efektif. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengelaborasi strategi-strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas PKn, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta pelibatan aktif masyarakat dan lingkungan sekitar dalam proses pendidikan. Dengan demikian, diharapkan PKn tidak hanya menjadi sekadar mata pelajaran, tetapi juga agen transformatif yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki integritas, nasionalisme, dan kepedulian sosial yang tinggi, demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Pendidikan merupakan sebuah aset dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia, untuk membantu manusia dari ketidakberdayaan hidup menuju manusia yang berdaya guna.

Implementasi, secara umum, adalah proses penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana, ide, kebijakan, atau sistem. Ini melibatkan tindakan nyata untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan atau ditetapkan. Implementasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Implementasi pendidikan adalah pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana pendidikan, kebijakan, atau program pendidikan ke dalam praktik nyata, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi pendidikan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Pendidikan diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi bagi Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pendidikan memiliki peranan yang sangat besar sebagai pusat keunggulan untuk mempersiapkan karakter manusia dalam menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, jika Indonesia telah berhasil membentuk karakter masyarakat Indonesia yang kuat, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat di semua sektor pada tahun 2045 atau 100 tahun setelah hari kemerdekaan. (Julaiha, 2014)

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam penguatan karakter siswa. Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan subjek penelitian meliputi guru PKn, siswa, dan pihak sekolah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pembelajaran, serta studi dokumentasi terhadap perangkat ajar. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi data dan member check, serta memperhatikan etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas partisipan dan memperoleh izin resmi dari pihak sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Istilah implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "to implement," yang menurut Kamus Webster berarti menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu atau memberikan dampak nyata pada suatu hal. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi juga dapat

dipahami sebagai penyediaan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki efek atau konsekuensi tertentu, dan definisinya bisa bervariasi tergantung pada bidang ilmunya.

Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi telah mengeluarkan panduan pengembangan Kurikulum Merdeka untuk satuan pengajaran, yang akan digunakan dalam proses pemulihan pembelajaran selama periode 2022-2024. Kurikulum nasional yang terkait dengan Kementerian Pendidikan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan tahapan rehabilitasi pembelajaran pada tahun 2024. (Tsuraya, 2022)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam menciptakan individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan aktif terlibat dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Di era globalisasi dan berbagai tantangan modern ini, memperkuat karakter bangsa adalah prioritas untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tulisan ini akan membahas betapa pentingnya PKn dalam kurikulum nasional dan strategi untuk mengoptimalkan perannya dalam memperkuat karakter bangsa.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Nasional untuk Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab dan Demokratis. PKn berfungsi sebagai alat utama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial. Melalui PKn, siswa diajak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ini akan membentuk individu yang kritis, rasional, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang demokratis.

Menangkal Radikalisme dan Intoleransi

Arus informasi yang cepat dan munculnya berbagai ideologi dapat menyebabkan dampak negatif seperti radikalisasi dan intoleransi. PKn berfungsi sebagai pelindung, membekali siswa dengan pemahaman tentang pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan pentingnya menghargai perbedaan. Ini membantu menumbuhkan sikap inklusif dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme.

Penguatan Identitas Nasional dan Karakter Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di tengah arus globalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi benteng penting untuk menjaga identitas nasional dan menumbuhkan patriotisme. PKn membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan Pancasila sebagai landasan negara, sehingga memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Lebih dari itu, PKn juga berperan dalam mengembangkan karakter moral dan etika. Ia menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja sama, kemandirian, dan tanggung jawab, yang esensial untuk membentuk generasi berintegritas yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa.

Strategi Optimalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk mengoptimalkan peran PKn, beberapa strategi perlu diterapkan:

1. Relevansi Kurikulum dan Materi Ajar: Kurikulum PKn harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan isu-isu kontemporer. Materi tidak boleh hanya bersifat teoritis, melainkan juga kontekstual dan aplikatif, dengan menggunakan kasus nyata dan isu terkini untuk menarik minat siswa dan membantu mereka mengaitkan PKn dengan kehidupan sehari-hari.
2. Pendekatan Pembelajaran Inovatif: Proses pembelajaran PKn tidak boleh monoton. Guru harus menerapkan metode inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.

3. Peran Guru sebagai Teladan: Guru PKn memiliki peran krusial tidak hanya dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai panutan dalam sikap dan perbuatan. Integritas, profesionalisme, dan komitmen guru sangat memengaruhi pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru PKn harus dilakukan secara berkala.
4. Keterlibatan Masyarakat dan Orang Tua: Pembentukan karakter bangsa adalah tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung implementasi PKn sangatlah penting. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter positif siswa. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan nilai-nilai kewarganegaraan juga perlu digalakkan.
5. Evaluasi Komprehensif: Evaluasi penerapan PKn harus menyeluruh, meliputi penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dinamika dan Filosofi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Mata pelajaran pendidikan, termasuk PKn, sering kali mengalami perubahan nama yang dipengaruhi oleh dinamika politik, namun esensi konten dan metode pengajarannya cenderung konsisten. Misalnya, PKn sering kali lebih fokus pada penghafalan daripada pengembangan pemikiran kritis, dengan penekanan pada politik dan kekuasaan. Pendekatan pengajaran yang didominasi guru juga sering menghasilkan respons yang terprediksi. Untuk mengatasi hal ini, transformasi dalam pendidikan kewarganegaraan mutlak diperlukan.

PKn adalah program yang berlandaskan negara, dan kehidupan sehari-hari. PKn juga mempertimbangkan aspek agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan ras, demi membentuk warga negara yang baik, menghargai kebhinekaan, cerdas, terampil, serta menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Secara epistemologis, pengembangan PKn yang demokratis secara global memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan adalah upaya manusia untuk mengembangkan potensi diri, menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga negara yang dewasa, berkarakter baik, berbakat, dan cakap. Oleh karena itu, pendidikan, termasuk PKn, adalah alat pendidikan dan sosio-kultural yang vital bagi peradaban manusia, berkontribusi signifikan bagi masyarakat, negara, dan kehidupan berbangsa.

Sejarah mencatat berbagai perubahan nama PKn di Indonesia, mulai dari masa Orde Baru dengan "Pembangunan Manusia adalah Pancasila" yang berlandaskan 36 butir P4, hingga era reformasi dengan nama PKn pada kurikulum 2004 dan 2006, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada kurikulum 2013. Tujuannya adalah melahirkan warga negara yang "kritis, demokratis, dan partisipatif."

Pancasila tak terpisahkan dari pembahasan PKn di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Kandia (2023), PKn berfungsi sebagai langkah preventif untuk mempertahankan dan mengimplementasikan Pancasila melalui upaya pendidikan yang meningkatkan kesadaran, pemahaman, apresiasi, pengetahuan, praktik, dan kesadaran nasional, serta tindakan preventif lainnya. Gustilianto menegaskan bahwa PKn berperan sebagai pencegah dan pemelihara Pancasila melalui kegiatan pendidikan yang meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan preventif. Ini sejalan dengan kondisi PKn di Nigeria, di mana pendidikan berperan membentuk warga negara yang nasionalis, mencegah konflik etnis, mengingat Nigeria rentan terhadap konflik diskriminasi dan rasisme.

Pendidikan selalu berorientasi pada peningkatan kesadaran, harkat, dan martabat individu, baik sebagai pribadi maupun bagian dari masyarakat suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003), pendidikan adalah usaha terencana dan sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri mereka dan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "to implement," yang menurut Kamus Webster berarti menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak nyata. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai pelaksanaan atau penerapan, atau penyediaan alat untuk menghasilkan suatu pengaruh. Makna implementasi bisa bervariasi tergantung pada bidang ilmunya.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran krusial dalam membentuk individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan aktif di masyarakat. Di era globalisasi dan berbagai tantangan saat ini, PKn berfungsi untuk memperkuat karakter bangsa demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional.. (Rahmatiani, 2020)

Simpulan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kurikulum nasional memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkarakter kuat. Dalam konteks globalisasi dan tantangan sosial yang semakin kompleks, PKn menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, nasionalisme, serta etika moral yang mencerminkan Pancasila. Penguatan karakter bangsa melalui PKn dapat dilakukan melalui pembaruan kurikulum yang kontekstual, metode pembelajaran yang inovatif, peran aktif guru sebagai teladan, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan PKn juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap ancaman radikalisme dan disintegrasi bangsa, sekaligus sebagai wadah untuk memperkuat identitas nasional. Seiring waktu, meski mengalami perubahan nama dan pendekatan, esensi pendidikan kewarganegaraan tetap bertumpu pada pengembangan warga negara yang cerdas, bermoral, dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus terus dikembangkan sebagai instrumen penting dalam menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat dan berkeadaban.

Referensi

- Anatasya, E., & Dewi, D. A. (2021). Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 291-304.
- Aulia, N., Sihite, I. E., Septemberiyani, D., & Silvania, Z. (2023). Implementasi Nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 655-661.
- Kandia, I. W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 65-75.
- Lubis, S. K. (2023). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap moderasi beragama siswa di SD IT Al Munadi Medan Marelan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 373-390.

Rojak, J. A. (2024). Upaya pengembangan karakter mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41-56.